BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah instansi yang berada dibawah naungan Pemerintah Kota Bandung. Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Pemerintahan Provinsi Jawa Barat mengalami perkembangan berdasarkan kebijakan yang terus menerus mengalami perubahan kearah yang lebih baik, sehingga dapat menjalankan kegiatan secara maksimal dalam memperbaiki kesejahteraan masyarakat. (DISKOMINFO) Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Badan Komunikasi dan Informatika (BAKOMINFO) Pemerintah Provinsi Jawa Barat merupakan Lembaga TeknisDaerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota BandungNomor 12 Tahun 2007, Tanggal 4 Desember 2007 serta merupakanpenggabungan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Dinas danKantor di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yaitu DinasInformasi dan Komunikasi dengan Kantor Pengolahan DataElektronik (KPDE). Dengan demikian Bakominfo berdiri sejakdiberlakukannya PERDA Nomor 12 Tahun 2007 tentangPembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota

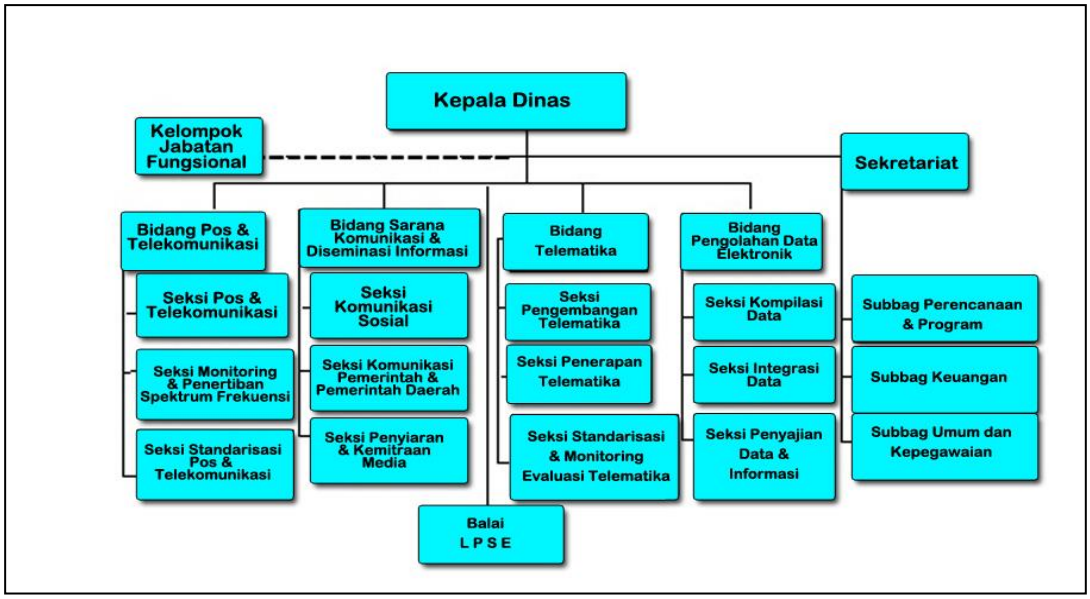
Bandung.Dengan diterbirkan dan berlakunya Perda Kota Bandung Nomor : 13Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Perda Kota Bandung No. 13Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi DinasDaerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah KotaBandung Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan danSusunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung Tanggal 7 Agustus2009, maka Badan Komunikasi dan Informatika Kota Bandungmenjadi Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO).

Perubahan ini merupakan kenaikan tingkat dan memiliki ruang lingkup serta cakupan kerja lebih luas. Sasarannya tidak hanya persoalan teknis, tapi juga kebijakan, baik hubungannya kedalam maupun menyentuh kepentingan publik khususnya dibidang teknologi informasi. Dengan platform dinas, maka Diskominfo dapat mengeluarkan regulasi mengenai teknologi informasi dalam kepentingan Provinsi Jawa Barat, terutama pencapaian Jabar Cyber Province Tahun 2012.Berdasarkan Perda tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika berada diperingkat 20. Dengan struktur organisasi sebagai berikut.

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO)

Pemerintah Provinsi Jawa Barat



Sumber : web Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat, membawahkan :

- Sub.Bagian Perencanaan dan Program
- Subbagian Keuangan;
- Subbagian Kepegawaian dan Umum;

3. Bidang Pos Dan Telekomunikasi, membawahkan :

- Seksi Pos Dan Telekomunikasi;
- Seksi Monitoring dan Penetiban Spektrum Frekuensi;

- Seksi Standarisasi Pos Dan Telekomunikasi;

4. Bidang sarana Komunikasi Dan Diseminasi Informasi, membawahkan :

- Seksi Komunikasi Sosial ;
- Seksi Komunikasi Pemerintah Dan Pemerintah dareah;
- Seksi Penyiaran Dan Kemitraan Media;

5. Bidang Telematika, membawahkan;

- Seksi Pengembangan Telematika;
- Seksi Penerapan telematika;
- Seksi Standarisasi dan Monitoring Evaluasi Telematika

6. Bidang Pengolahan Data Elektronik, membawahkan:

- Seksi Kompilasi Data ;
- Seksi Integrasi Data ;
- Seksi Penyajian Data dan Informasi.

7. Balai LPSE

- Tata Usaha LPSE
- Layanan Informasi LPSE
- Dukungan dan Pendayagunaan TIK LPSE

2.1.1 Visi dan Misi DISKOMINFO

Visi

"Terwujudnya masyarakat informasi Jawa Barat melalui penyelenggaran komunikasi dan Informatika yang efektif dan efisien".

Misi

- Meningkatkan sarana dan prasana dan profesionalisme sumber daya aparatur bidang Komunikasi dan Informatika;
- Mengoptimalkan pengelolaan pos dan telekomunikasi;
- Mengoptimalkan pemanfaatan sarana Komunikasi dan Informasi pemerintah dan masyarakat, serta melaksanakan diseminasi informasi;
- Mewujudkan layanan online dalam penyelenggaraan pemerintah berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi serta mewujudkan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik;
- Mewujudkan pengelolaan data menuju satu data pembangunan untuk Jawa barat.Motto : "West Java Cyber Province Membangun Masyarakat Informasi

2.2 Struktur Organisasi

Sebelum menggambarkan struktur organisasi Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Pemerintah Provinsi Jawa Barat, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu definisi struktur dan definisis organisasi.

2.2.1 Struktur dan Organisasi

Struktur adalah tata ukur, tata hubung, tata letak dalam suatu system yang membentuk satuan kerja. Dalam ilmu ekonomi, struktur berhubungan dengan sistem penyaluran atau distribusi gaya-gaya eksternal maupun internal ke dalam manajemen.

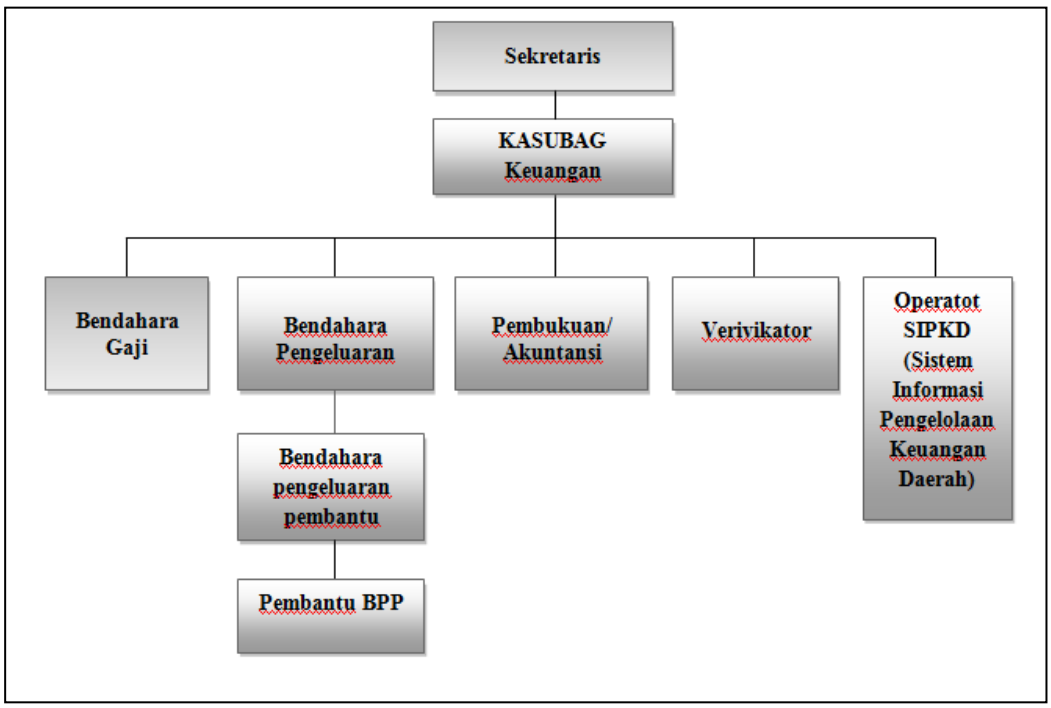
Organisasi adalah suatu wadah berkumpulnya minimal dua orang atau lebih untuk mencapai sebuah tujuan. Maka **Struktur Organisasi** adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian secara posisi yang ada pada perusahaan dalam menjalin kegiatan oprasional untuk mencapai tujuan (Wikipedia). Sesuai struktur organisasi, pada kerja praktek ini penulis di tempatkan pada bagian pembukuan. Berikut adalah struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bagian Sekretaris (keuangan).

2.2.2 Struktur Organisasi Bagian Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika(DISKOMINFO) Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Berikut adalah struktur organisasi bagian keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Pemerintah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan kerja praktek yang dilakukan penulis.

Gambar 1.2

Strutur Organisasi bagian Sekretaris (keuangan) Dinas Kominfo Pemerintah Provinsi Jawa Barat



Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dan penulis ditempatkan pada bagian pembukuan.

2.3 Deskripsi Jabatan

a. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Dinas dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugastugas lingkup pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan dan pengkoordinasian tugas-tugas bidang.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretaris mempunyai fungsi :

- Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan dan rencana kerja dinas;
- Pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan dan pelayananan administrasi kesekretariatan dinas yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, program dan keuangan;
- Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugastugas bidang;
- Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan laporan kegiatan dinas;
- Pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan; dan
- Pelaksanaan tugas lain dari pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

b. Bendahara Gaji

Bendahara gaji bertugas untuk melakukan pencatatan atas penerimaan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), belanja tidak langsung / gaji.

c. Bendahara Pengeluaran

Bendahara pengeluaran bertugas untuk memvisum Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan melakukan penandatanganan pengesahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) bersama pengguna anggaran. Bendahara pengeluaran membawahi Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP). Kemudian BPP membawahi Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (P-BPP). Tugas BPP dan P-BPP adalah sebaga berikut :

- **Bendahara Pengeluaran Pembantu**

  Bendahara Pengeluaran pembantu (BPP) bertugas untuk membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) untuk diserahkan ke yang berwenang.

- **Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu**

  Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (P-BPP) bertugas apabila SPJ masih ada kekurangan akan diperbaiki dan dilengkapi kembali kemudian di paraf untuk diverifikasi.

d. Pembukuan / Akuntansi

Bagian pembukuan / Akuntansi bertugas untuk melakukan pencatatan administrasi keuangan baik pengeluaran maupun pemasukan kas pada BKU (tidak ada debit atau kredit), penjurnalan, posting pada buku besar dan laporan realisasi anggaran.

e. Verifikator

Verifikator bertugas untuk memeriksa kebenaran, kelengkapan dan keabsahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Setelah SPJ sudah benar , lengkap dan sah, dikembalikan ke bendahara pengeluaran pembantu dan kemudian aslinya diserahkan kepada verifikator.

f. Operator Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)

Tugas Operator Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

- Menyajikan APBD dan realisasi APBD Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
- Menyajikan neraca daerah;
- Menyajikan laporan arus kas daerah;
- Menyajikan catatan atas laporan keuangan daerah;
- Menyajikan laporan Keuangan Perusahaan Daerah

2.4 Aspek Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Aspek kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Jawa Barat, diantaranya :

- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, penyelenggaraan pemerintahan yang berbasiskan teknologi informasi dan komunikasi

- Menigkatkan penataan sistem manajemen dan proses kerja yang terpadu atau modernisasi di bidang administrasi Pemerintah Daerah agar dapat mengaplikasikan telekomunikasi, multimedia dan informatika (telematika).
- Mengoptimalkan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi antar OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
- Menyelenggaraan perumusan, penetapan pengaturan dan koordinasi serta pelaksanaan kebijakan teknis urusan teknis pos dan telekomunikasi, sarana komunikasi dan diseminasi, telematika, serta pengolahan data elektronik;